

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK TIDAK SAH SEBELUM DAN SETELAH
PUTUSAN MAHKMAAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU/VII/2010**

Oleh :

Sasmiar¹

ABSTRACT

Child are generation who are the continuer of nation. Every child have the self respect and honor. Those are respected highly. Every child, who had been born, had to get their right automatically. The Child need to be protected and a guarantee in fulfilling for their right and non discrimination manner of dealings. But in fact, most of the child are not get their right yet, aspecially unlawful child. This is mentioned in article 43 subsection (1) the law of marriage, that the child who are born before marriage, are not have the condition of being civil law relationship with the father. The Contitution Justice Court had been adjudicate, that beside of the child have the condition of being civil law relationship with the mother and the mother's family, they also have the condition of being civil law relationship with the father and the father's family as long as they can to proof scientifically .

Keywords : *unlawful child, the condition of being civil law relationship*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan haknya tanpa anak tersebut memintanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi Hak Anak yang diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum hak anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

¹ Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jambi

Prinsip-prinsip ini juga terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk Pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplemntasikan di Indonesia²

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Bahwa agar setiap anak mampu memukul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Walaupun telah disadari bahwa anak sebagai generasi penerus untuk pembangunan dan memimpin negara dikemudian hari, namun dalam kenyataannya masih banyak anak yang belum menikmati haknya, terutama untuk anak tidak sah. Dalam kehidupan bermasyarakat anak tidak sah lemah dimata hukum dan tidak ada lembaga yang khusus melindungi anak tidak sah tesebut.

Harus diakui bahwa persoalan keabsahan anak akan selalu bergantung pada masalah keabsahan perkawinan dan segala aspek hukum yang menyertainya. Karena sah tidaknya anak yang dilahirkan akan ditentukan oleh sah tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.³ Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) tesebut menghendaki agar perkawinan itu dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum bagi para pihak, sedangkan perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga hukum tidak akan melindungi segala akibat yang

² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009 hal.1

³ D.Y Witanto, *Hak dan Kedudukan anak Luar kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012 hal. 24

timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut, baik bagi pihak itu sendiri maupun terhadap anak yang dilahirkan.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan menjadi anak tidak sah sebagaimana diatur pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”. Ketentuan ini memberikan perbedaan perlakuan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut dijudicial review oleh Hj. Aisyah Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, menyatakan mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan pasca *judicial review* berbunyi “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimanakah kedudukan anak tidak sah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VII/2010?
2. Bagaimanakah kedudukan anak tidak sah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor .46/PUU-Vii/2010?

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Anak Tidak Sah Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VII/2010

Menurut KUHPdata ada dua macam anak, yaitu anak sah dan anak tidak sah (anak luar kawin). Pengertian ini penting karena membawa akibat hukum yang berbeda. Anak sah adalah “tiap-tiap anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya (Pasal 250)”. Pasal 250 KUHPdata berpangkal pada anggapan bahwa suami adalah bapak anak yang dilahirkan atau yang menjadikannya dalam perkawinan⁴. Menurut Pasal 42 UU Perkawinan, “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” Menurut Abdulkadir Muhammad, dari ketentuan Pasal 42 tersebut ada dua macam anak sah, yaitu;

- a. Anak yang lahir dalam perkawinan ada dua kemungkinan;
 - (1). Setelah perkawinan berlangsung, istri baru hamil, kemudian melahirkan anak
 - (2) Sebelum perkawinan berlangsung, istri telah hamil lebih dahulu. Sesudah dilangsungkan perkawinan istri melahirkan.
- b. Anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan. Dalam hal ini, istri setelah perkawinan kemudian terjadi perceraian atau kematian suami. Setelah terjadi peristiwa itu istri baru melahirkan⁵.

Bagi anak sah sudah jelas mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Hal ini berbeda dengan anak tidak sah, karena dalam Undang-Undang Perkawinan anak tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut Pasal 280 KUHPdata diperlukan tindakan pengakuan

⁴ R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986 hal. 132

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 hal. 94

secara formil agar mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya. Menurut J. Satrio, bahwa antara anak tidak sah dengan ayah (Biologis) maupun dengan ibunya pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau ayah dan/atau ibunya memberikan pengakuan⁶.

Berdasarkan Psl 272 BW, anak tidak sah dapat dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu;

- a. Anak zina, menurut konsep hukum perdata barat adalah anak yang dilahirkan dalam hubungan antara seorang laki-dan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain.
- b. Anak karena sumbang, yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan karena terikat hubungan darah yang begitu dekat.
- c. Anak luar kawin lainnya, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain dari anak zina dan anak sumbang.

Tindakan pengakuan terhadap anak tidak sah menurut Pasal 280 BW hanya diberikan kepada anak tidak sah selain dari anak zina dan anak sumbang. Ini berarti anak zina dan sumbang tidak dapat diakui orang tua biologisnya. Akibatnya anak tersebut tidak memiliki hak keperdataan dari orang tua biologisnya kecuali hanya memiliki hak untuk mendapat nafkah seperlunya sebagaimana diatur dalam Pasal 867 ayat (2) KUHPerdata⁷. Jadi anak tidak sah yang lahir karena perzinaan dan sumbang tidak mendapatkan status dihadapan hukum karena tidak dapat diakui sebagaimana diatur pada Pasal 283 KUHPerdata dan pengesahan sebagaimana diatur pada Pasal 272KUHPerdata.

⁶ J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 hal.106

⁷ D.Y. Witanto, *Op. Cit*, hal. 40

Pengakuan terhadap anak tidak sah dapat dilaku dengan 2 cara, yaitu:

a. Pengakuan secara sukarela

Pengakuan sukarela adalah suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang telah ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya / ibunya seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan. Berdasarkan Pasal 281 KUHPdata pengakuan secara sukarela dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Dalam akte kelahiran anak yang bersangkutan
2. Dalam akte perkawinan
3. Dalam akta otentik⁸.

Pengakuan anak tidak sah yang dilakukan oleh ayah biologisnya tidak diperkenankan secara hukum, jika ibu si anak tidak menyetujuinya. Hal ini untuk menghindari kekeliruan dalam menentukan asal usul anak karena sang ibulah yang lebih tahu siapa ayah biologis yang sebenarnya.

b. Pengakuan secara paksa

Pengakuan secara paksa terjadi jika dengan Putusan Pengadilan status seorang anak tidak sah selain anak zina dan anak sumbang ditetapkan atas dasar gugatan anak itu sendiri. Gugatan ini dapat diajukan terhadap ibunya (Pasal 288 KUHPdata) dan terhadap ayahnya (Pasal 287 KUHPdata). KUHPdata memperbolehkan mengadakan penyelidikan siapa ibu anak tersebut untuk digugat agar mengakui anak yang tidak sah itu, namun penyelidikan siapa ayahnya pada umumnya tidak diperbolehkan⁹. Penyelidikan siapa ayah anak tersebut hanya diperbolehkan dalam hal terjadinya salah satu kejahatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 285-288, 294 dan 332 KUHPidana (kejahatan terhadap kesusialaan; perkosaan, perbuatan cabul dengan anaknya sendiri dan sebagainya)¹⁰.

⁸ J. Satrio, *Op. Cit* hal. 110

⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safoedin, *Op. Cit* hal 145

¹⁰ *Ibid*

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata, anak tidak sah baru memiliki hubungan perdata dengan ayah atau ibunya jika ayah atau ibunya melakukan tindakan pengakuan secara formil, yaitu dinyatakan dalam suatu akta. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, dimana kedudukan anak tidak sah demi hukum memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur pada Pasal 43 ayat (1). Namun pada Pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak tidak sah tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUHPerdata. Sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah keluarnya Undang-Undang Perkawinan tetap diperlakukan suatu tindakan pengakuan agar tercipta hubungan perdata dengan ayahnya, sedangkan dengan ibu tidak diperlukan pengakuan karena demi hukum memiliki hubungan perdata, yaitu hubungan dalam lapangan kekeluargaan dan hubungan dalam lapangan harta kekayaan (sebagai ahli waris).

Lembaga “Pengakuan Anak” ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 49 ayat (1) mengatur tentang “Pencatatan Pengakuan Anak”, yaitu;

- 1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan,
- 2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Penjelasan Pasal 49 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Adapun syarat dokumen yang diperlukan untuk mengurus akta pengakuan anak adalah;

- Surat pernyataan pengakuan si ayah yang diketahui ibu anak tersebut.
- KTP dan Kartu Keluarga ayah dan ibu
- KTP dan Kartu Keluarga para saksi
- Akta kelahiran anak luar nikah dan akta kelahiran si ayah dan si ibu¹¹.

Menurut Neng Djubaidah, bahwa Pasal 49 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan hanya berlaku bagi orang yang tidak beragama Islam, karena hukum Islam melarang pengakuan terhadap anak yang secara jelas sebagai anak hasil zina¹². Ajaran Islam memang mengenal “pengakuan anak” tetapi dengan syarat-syarat tertentu, dan bukan dilakukan terhadap anak hasil zina. Kedudukan anak hasil zina secara tegas ditentukan dalam hadis Rasulullah S.A.W., bahwa ia hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja¹³.

2. Kedudukan Anak Tidak Sah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010

Latar belakang lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, karena adanya permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Hj.

¹¹ NM Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Penerbit, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010 hal. 216.

¹² Neng djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Pidak Dicatat*, Penertbit Sinar Grafika, Jakarta, , 2010 hal. 363.

¹³ *Ibid*, hal. 364

Asyiah Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan sebagai pemohon yang materi pokok permohonannya adalah telah berlangsung perkawinan antara pemohon Hj. Aisyah Mochar binti H. Mochtar Ibrahim dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. Moerdiono pada Tanggal 20 Desember 1993, namun karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) , maka pemohon merasa tidak mendapatkan haknya dihadapan hukum dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Adapun alasan-alasan Permohonan Uji Materiil UU Perkawinan, antra lain:

1. Bahwa pemohonan merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan kerugian dengan diundangkannya UU Perkawinan terutama yang berkaitan denan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak.
2. Bahwa Hak Konstitusional pemohon yang telah dilanggar dan dirugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 tersebut maka pemohon dan anaknya memiliki hak konsitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oelh pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Tapi karena Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengharuskan perkawinan dicatat mengakibatkan perkawinan yang sah menurut hukum agama tapi tidak dicatatkan berdampak ke status anak. Selain itu akibat dari ketentuan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan antara bapak dengan anaknya.

Atas perkara tersebut, Mahkamah Konsititusi memutuskan bahwa; Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”* tidak memiliki kekekuatan mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata

dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”

Dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diketahui, bahwa Putusan tersebut berlaku untuk semua anak tidak sah termasuk anak zina dan anak sumbang, walaupun latar belakang persoalan yang diajukan pemohon menyangkut masalah akibat perkawinan siri. Hal ini bisa dilihat dari isi pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diajukan pemohon *judicial review* yang berbunyi:

Hubungan hukum anak dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapaknya. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinan, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang lahir di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 53 KHI yang menentukan, bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan ketentuan Pasal 99 huruf (a) KHI serta Pasal 42 UU perkawinan, yang menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, maka anak zina (anak yang dibiuhkan di luar perkawinan) dapat berkedudukan sebagaimana anak sah jika anak tersebut dilahirkan di dalam perkawinan yang sah. Akibat hukumnya anak tersebut akan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan suami

ibunya. Namun menurut Neng djubaidah, dalam memahami Pasal 99 huruf (a) KHI , bahwa anak yang dilahirkan “dalam” perkawinan yang sah, harus disesuaikan dengan Hukum Islam¹⁴.

Putusan Mahkamah Konstitusional. Menurut D.Y.Witanto cukup *progresif* dan *revolusioner* karena terlepas dari hukum agama yang tidak pernah mungkin berubah menyangkut kedudukan anak luar kawin (anak zina) yang hanya bisa dinasabkan kepada ibunya¹⁵. Ini senada dengan yang dikatakan Mahfud, bahwa Sejak Putusan ini diketok palu, anak yang lahir di luar perkawinan resmi, baik kawin siri, dari perselingkuhan, hidup serumah tanpa pernikahan akan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, putusan ini sangat *revolusioner*¹⁶.

Berbeda dengan ketentuan dalam KUHperdata, bahwa hubungan perdata antara anak tidak sah dengan ayah dilakukan melalui tidakan pengakuan secara sukarela oleh ayahnya kemudian didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, maka dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, walaupun hubungan perdata dengan ayahnya tidak terjadi demi hukum, namun tidak diperlukan kesukarelaan dari ayah biologisnya. Bahkan mereka berhak membuktikan bahwa seorang laki-laki yang mereka tunjuk adalah ayah yang telah membenihkannya.

Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum pokok permohonan menyebutkan, bahwa:

“Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya.

¹⁴ *Ibid* hal. 330

¹⁵ D.Y.Witanto *Op. Cit*, hal. 254

¹⁶ <http://www.tempo.co.id/read/news/2012> diakses tanggal 18 februari 2012.

Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa kelahiran, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subyek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Konsitusi memutuskan bahwa, akan timbul hubungan hukum antara anak tidak sah dengan ayah biologisnya yang nyata dan terbukti bahwa anak dan ayah memiliki hubungan darah atau si ayah adalah orang telah membenihkan si anak di rahim ibunya, sehingga dengan terbukanya hubungan perdata tersebut, maka timbullah hak *alimentasi* (pemeliharaan) antara anak tidak sah dengan ayah biologisnya. Menurut Syafran Syofwan, dengan diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan¹⁷.

Jika melalui putusan pengadilan terbukti seorang laki-laki sebagai ayah biologis si anak, maka ia berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya seperti halnya kewajiban terhadap anak sah yang diatur pada Pasal 45 UU Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, “ Kedua orang tua wajib memelihara dan menididik anak-anak mereka dengan baik. Begitu juga sebaliknya dengan terbukanya hak keperdataan anak dengan ayah biologisnya, maka timbul pula kewajiban bagi si anak untuk menghormati orang tuanya dan jika anak telah dewasa wajib memelihara si ayah biologis sebagaimana orangtuanya yang sahnya jika si ayah membutuhkan pemeliharaan dari anak sebagaimana diatur pada pasal 46 ayat (1) UU perkawinan, bahwa “ Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Kemudian Pasal 46 ayat (2) mengatur bahwa jika

¹⁷ Syafran Sofyan, *Anallisi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*, <http://www.lemhanas.go.id> diakses tanggal 20 juli 2012

anak dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka meminta.

Menurut D.Y. Witanto, dengan adanya ruang bagi si anak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan akan membuat anak bisa hidup dengan wajar, walaupun dalam pandangan sosial ia tetap tidak mungkin bisa keluar dari stigma bahwa dia adalah anak zina atau anak haram¹⁸. Yang terpenting anak yang dilahirkan di luar perkawinan mendapatkan kedudukan yang layak dihadapan hukum

C. KESIMPULAN

1. Menurut pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelum *judicial review*, anak yang dilahirkan di luar perkawinan demi hukum mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dan bukan anak dari ayah biologisnya. Hubungan perdata dengan ayahnya baru terjadi jika ayah biologisnya melalui tindakan pengakuan dengan persetujuan ibunya.
2. Menurut pasal 43 ayat (1) setelah *judicial review*, tidak diperlukan tindakan pengakuan untuk terjadinya hubungan perdata dengan ayahnya karena dengan adanya putusan MK tersebut maka diakuinya anak luar perkawinan sebagai anak sah. Jika melalui putusan pengadilan si anak dan ibunya dapat membuktikan bahwa seorang laki-laki adalah ayah biologisnya.

¹⁸ D.Y. Witanto, *Op. Cit*, hal. 275.

DAFTAR PUSTAKA

- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tercatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Kuncoro, Wahyu, NM, *Solusi Cerdas Menghadapi Masalah Keluarga*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010,
- Prawiro hamidjojo, Soetojo dan Safioedin, Asis, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986
- Saraswati, Rike, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Satrio,J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, bandung, 2000
- Witanto,DY, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2012
- Sofyan, Syyafran, *Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*, <http://www.Lemhanas.go.id>, diakses tanggal 20 Juli 2012
- Tempo, *Ayah Bertanggung Jawab atas Anak di Luar Nikah*, <http://www.tempo.co/read/news/2012/02/2012>, diakses tanggal 18 Pebruari 2012
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Kompilasi Hukum Islam